



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN IV 2021

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan IV 2021 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan IV 2021.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2021.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan IV 2021 telah diupayakan melalui sasaran kegiatan pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) Sasaran kegiatan, yaitu : ⁽¹⁾ Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat; ⁽²⁾ Terelenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP; dan ⁽⁴⁾ Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Penyusunan LKj Triwulan IV 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Semoga di masa mendatang kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan.

Jakarta, 17 Januari 2022

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksono. A.Pi. MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan IV 2021

1. Koordinator Kelompok Pengawakan dan Logistik
2. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha
3. Husain. S.Kom

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2021

1. Ikrom Bungsu. S.Pi
2. Bilmantasya Al Fattha. ST
3. Putu Pinandytha Bagus Rinata. S.Kel
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	14
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	17
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	18
Perjanjian Kinerja 2021	19
Pengukuran Capaian Kinerja	22

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV 2021	24
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	26
Sasaran Kegiatan 1	27
Sasaran Kegiatan 2	28
Sasaran Kegiatan 3	43
Sasaran Kegiatan 4	46
Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	57

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2021	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2021	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2021	22
Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi Direktorat POA Triwulan IV 2021	25
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan IV 2021	27
Tabel 6. Daftar Armada Kapal Pengawas Dioperasikan Direktorat POA	28
Tabel 7. Target dan realisasi IKU-2 periode Triwulan IV 2021	29
Tabel 8. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2017-2021	30
Tabel 9. Capaian Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan	30
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan IV 2021	32
Tabel 11. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli	32
Tabel 12. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode VIII B 2021	34
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan IV 2021	40
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan IV 2021	42
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan IV 2021	43
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan IV 2021	43
Tabel 17. Rincian perawatan armada kapal pengawas tahun 2021	44
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan IV 2021	46
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan IV 2021	47
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan IV 2021	48
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan IV 2021	50
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan IV 2021	51
Tabel 23. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan IV 2021	51
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan IV 2021	52
Tabel 25. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan IV 2021	53
Tabel 26. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan IV 2021	54
Tabel 27. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan IV 2021	54
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan IV 2021	55
Tabel 29. Target dan reaslisasi IKU-19 periode Triwulan IV 2021	56
Tabel 30. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2021	57
Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Direktorat POA	59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14
Gambar 2. Grafik capaian hasil operasi kapal pengawas kurun waktu (2017-2021)	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV 2021. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi. sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2021 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK). Target pencapaian IKU/IK periode Triwulan IV 2021 sebanyak 19 IKU/IK dan sebanyak 19 IKU/IK telah memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan IV 2021 mencapai 109,23% meningkat dari triwulan tahun IV 2020 sebesar 107.50%.

Berbagai kebijakan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Triwulan IV 2021 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP seperti: pemantauan SDKP baik menggunakan satelit maupun pesawat, operasi kapal pengawas, pembinaan POMASWAS, supervisi pembangunan Sarana/Prasarana pengawasan, penyusunan regulasi di bidang Pemantauan dan Operasi Armada.

Di bidang anggaran. Direktorat POA sampai dengan Triwulan IV 2021 telah melaksanakan 13 Klasifikasi Rincian Output kegiatan dalam APBN Direktorat POA. Ditjen PSDKP tahun 2021. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar **Rp338.362.698.000** (*tiga ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan berdasarkan penyesuaian anggaran/*refocusing* anggaran, pagu Satker Dit. POA menjadi **Rp201.122.826.000** (*dua ratus satu milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Berdasarkan pagu **Rp201.122.826.000** (*dua ratus satu milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*), hingga akhir Desember 2021, Direktorat POA telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar **99,77%** atau sejumlah **Rp.200.660.185.239** (*dua ratus milyar enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah*), dengan target prognosa sebesar **98.51%** atau sejumlah **Rp198,117,933,316** (*seratus Sembilan puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah*).

Meskipun target kinerja maupun anggaran telah mencapai target, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali agar nilai kinerja dapat lebih maksimal dan serapan anggaran dapat mencapai 100%. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan seperti memaksimalkan pencapaian seluruh indikator kinerja dan anggaran dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan ketat, sehingga segala hambatan dapat segera dimitigasi secara dini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1 Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	91	100	109,89
2	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	2 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas (%)	23,86	24,12	101,09
		3 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Pesawat patroli (%)	60,3	60,37	100,12
		4 Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	96,67	120,84
		5 Indeks kinerja operasional kapal pengawas (Indeks)	86,75	90,68	104,53
		6 Indeks kinerja operasional speedboat pengawas (Indeks)	86,75	95,57	110,17
		3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7 Persentase penyelesaian pembangunan Speedboat Pengawas (%)	66,35
		8 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100	100	100%
4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	89,96	112,45

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA	100	100	100%
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	73	74,30	101,78
		12	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	76	88	115,79
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	98,77	109,74%
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Direktorat POA	1	1	100%
		15	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	1	100%
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	72.5	100	137,93
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	72.5	93,39	128,81
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	84	98,79	117,61
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	65	80	123,08
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA					109,23	

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan IV 2021

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA Triwulan IV 2021 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode Triwulan IV 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2021 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Indonesia memiliki luas total sebesar 7.81 juta km² yang terdiri dari 2.01 juta km² daratan, 3.25 juta km² lautan dan 2.55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ditambah dengan adanya perbatasan laut dengan 10 negara tetangga antara lain: India, Thailand, Republik Palau, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini dan Vietnam. Hal ini menjadi tantang tersendiri, mengingat potensi terjadinya klaim wilayah masuknya nelayan dari negara lain di wilayah perairan Indonesia.

Masih ditemukan pelaku IUU *fishing* yang kembali tertangkap oleh petugas. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya efek jera terhadap para pelaku IUU *fishing*. Disamping itu berkembangnya modus operandi pelaku IUU *fishing* serta implementasi kebijakan pimpinan terkait pelarangan alat tangkap tertentu.

Belum redanya bencana non alam Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia menyebabkan terbatasnya ruang gerak dan meningkatnya ancaman bagi personil Awak Kapal Pengawas perikanan maupun pegawai Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada secara keseluruhan.

Beberapa tantangan sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan kesiapan anggaran, kesiapan armada pengawasan (Kapal Pengawas Perikanan dan *Airborne Surveillance*), strategi operasi yang mumpuni, data intelijen yang akurat, kesiapan personil, penerapan teknologi mutakhir serta kolaborasi antar instansi, pemerintah daerah dan antar negara.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

ILLEGAL FISHING MASIH MARAK

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing*. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku *illegal fishing* oleh Kapal Pengawas Perikanan sepanjang tahun 2021. Tercatat sebanyak 53 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 114 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat

untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

PENGUATAN ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal sebanyak 2 unit yaitu “Hakurei Maru” dan “Shirahagi Maru”. Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan rencana hibah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu: Ditjen PSDKP, BPPT dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 26 s.d 29 November 2019 di Jepang. Untuk memastikan kapal dalam kondisi baik, telah dilakukan survey

Direncanakan pengiriman ke Indonesia pada tahun 2022. karena pada tahun 2020 masih periode akhir penugasan kapal tersebut di Jepang. Agenda perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2021. sehingga baru tahun 2022 kapal tersebut dikirim ke Indonesia.

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengecekan langsung oleh Tim, kedua kapal tersebut secara fisik masih terawat dengan baik dan laik laut. Namun demikian, Tim Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: meminta Pemerintah Jepang untuk memastikan kapal benar-benar dalam kondisi laik operasi pada saat proses hibah, meminta manual book kapal dan mesin disiapkan dalam berbahasa Inggris dan meminta mesin diesel yang terpasang di kapal dapat bekerja dengan bahan bakar bio diesel sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia.

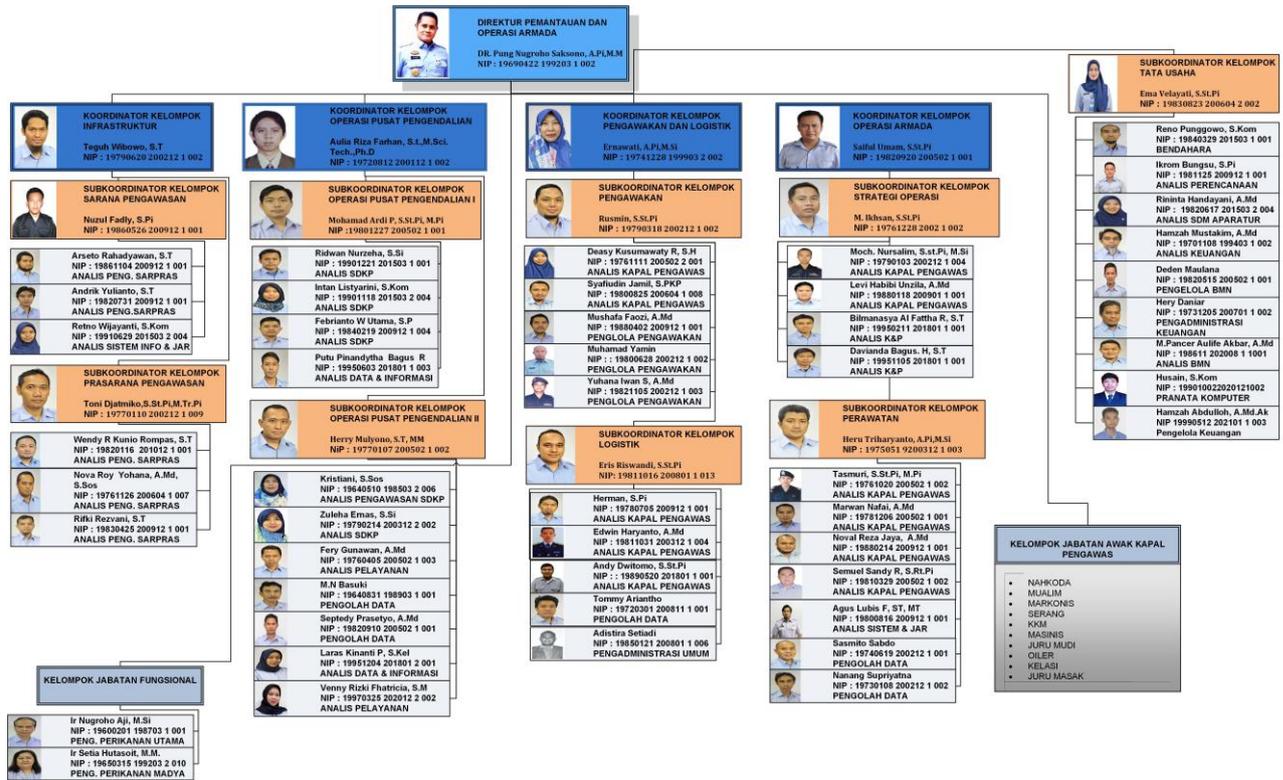
SINERGITAS OPERASI PENGAWASAN SDKP

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti: *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking* / Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan besar bila saling bersinergi.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

1. Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria. pemberian bimbingan teknis dan supervisi. serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur. peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. operasi pusat pengendalian pengawasan. pengawakan dan logistik armada pengawasan. dan operasi armada pengawasan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur. peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. operasi pusat pengendalian pengawasan. pengawakan dan logistik armada pengawasan. dan operasi armada pengawasan;
- penyiapan penyusunan norma. standar. prosedur. dan kriteria di bidang infrastruktur. peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. operasi pusat pengendalian pengawasan. pengawakan dan logistik armada pengawasan. dan operasi armada pengawasan;
- penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur. peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. operasi pusat

- pengendalian pengawasan. pengawakan dan logistik armada pengawasan. dan operasi armada pengawasan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur. peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan. operasi pusat pengendalian pengawasan. pengawakan dan logistik armada pengawasan. dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas. fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA. Ditjen. PSDKP tahun 2021 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja. evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2021

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA. Ditjen. PSDKP periode Tahun 2021 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan IV 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel. Direktorat POA. Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2021.

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024 YANG DIAMANATKAN KEPADA DITJEN PSDKP

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. KKP telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Disamping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal-kapal pelaku *IUU fishing* dan *destructive fishing*.
2. Peningkatan kemampuan pusat pengendalian Ditjen. PSDKP.
3. Peningkatan kapal pengawas (jumlah dan ukuran).
4. Pemusnahan barang bukti/kapal pelaku *illegal fishing*.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara :
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP; dan
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen PSDKP.
2. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;

- d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan; dan
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020. Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran. yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;

- c. Penyediaan Logistik dan Pengawakan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan operasi armada dan peningkatan infrastruktur didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter;
3. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya;
4. Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi;
5. Prasarana Pengawasan SDKP yang Disupervisi Pembangunannya;
6. Sarana Pengawasan SDKP yang Disupervisi Pembangunannya;
7. Sarana Pengawasan SDKP Lainnya;
8. Operasi Kapal Pengawas;
9. Operasi Pesawat Patroli;
10. Operasi Speedboat;
11. Pengadaan Kapal Pengawas;
12. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
13. Sistem Pemantauan SDKP yang Terintegrasi dan Operasional.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2021

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2021 terdiri atas 4 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja. berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	91	91	%
2	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	2	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	23,86	23,86	%
		3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	59.51	60,3	%
		4	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	80	%
		5	Indeks kinerja operasional kapal pengawas (Indeks)	86.75	86.75	Indeks
		6	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas (Indeks)	86.75	86.75	Indeks
		3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Persentase penyelesaian pembangunan Speedboat Pengawas (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN
		8	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100	100	%
4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	80	Indeks
		10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA	100	100	%
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	73	73	Indeks
		12	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	76	76	Nilai
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	90	Nilai
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Direktorat POA	1	1	Inovasi
		15	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	1	Inovasi
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	72.5	72.5	%
		17	Tingkat Kepatuhan	72.5	72.5	%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN
		Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA			
	18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	84	84	%
	19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	65	65	%

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung dengan alokasi anggaran yang ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pagu Awal	Refocusing	Pagu Akhir
1	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	120,960,000	-120,322,000	638,000
2	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT)	2,090,064,000	-443,324,000	1,646,740,000
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	914,100,000	-361,190,000	552,910,000
4	Operasi Armada Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya	217,840,000	-108,920,000	108,920,000
5	Prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya	500,000,000	-100,000,000	400,000,000
6	Sarana Pengawasan SDKP yang disupervisi	872,217,000	-73,983,000	946,200,000

No.	Kegiatan	Pagu Awal	Refocusing	Pagu Akhir
	Pembangunannya			
7	Sarana Pengawasan SDKP Lainnya	10,000,000,000	9,628,678,000	371,322,000
8	Operasi Kapal Pengawas	149,251,008,000	-50,697,775,000	98,553,233,000
9	Operasi Pesawat Patroli	175,700,000,000	9,990,000,000	37,911,387,000
10	Kapal Pengawas	175,700,000,000	-175,257,860,000	442,140,000
11	Speedboat Pengawas	0	1,657,600,000	1,657,600,000
12	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	47,646,850,000	6,375,700,000	54,022,550,000
13	Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5,582,436,000	1,073,250,000	4,509,186,000
Anggaran Direktorat POA Tahun 2021		420,816,862,000	219,694,036,000	201.122.826.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan IV 2021

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2021

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan IV 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat POA sebesar 109,23%** dengan indikator NPSS berwarna **HIJAU**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tabel capaian kinerja organisasi berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi Direktorat POA Triwulan IV 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	91	100	109,89
2	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	2	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas (%)	23.86	24,12	101,09
		3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Pesawat patroli (%)	60,3	60,37	100,12
		4	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	80	96,67	120,84
		5	Indeks kinerja operasional kapal pengawas (Indeks)	86.75	90,68	104,53
		6	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas (Indeks)	86.75	95,57	110,17
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Persentase penyelesaian pembangunan Speedboat Pengawas (%)	66,35	96,79	145,88%
		8	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100	100	100%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	%	
4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	89,96	112,45
		10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA	100	100	100%
		11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	73	74,3	101,78
		12	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	76	88	115,79
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	98,77	109,74%
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Direktorat POA	1	1	100%
		15	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	1	100%
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	72.5	100	137,93
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	72.5	93,39	128,81
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	84	98,79	117,61
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	65	80	123,08

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)

1

TINGKAT KEAKTIFAN PROVINSI DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

Dalam dokumen anggaran TA. 2021 lingkup Direktorat POA, telah di alokasikan anggaran pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk seluruh Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dengan total anggaran sebesar Rp1,900,500,000. Anggaran tersebut, digunakan untuk fasilitasi dan pembinaan POKMASWAS. DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan kepada POKMASWAS di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan POKMASWAS tetap terhubung dengan Pemerintah, sehingga dapat membantu mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.

POKMASWAS merupakan elemen penting dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat, dengan adanya peran serta masyarakat, maka dapat mempersempit ruang gerak para pelaku IUU *Fishing*. POKMASWAS berasal dari masyarakat, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat sesegera mungkin terdeteksi dan memberi tindakan yang diperlukan.

Untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan, telah disusun Indikator Kinerja “Tingkat Keaktifan Provinsi dalam Pembinaan POKMASWAS”. Pembinaan dimaksud, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan *tools* berupa “form keaktifan POKMASWAS”. Formula perhitungan sebagaimana terlampir.

Hasil pembinaan tersebut dikirimkan kepada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Verifikasi yang dilakukan meliputi data dan jumlah POKMASWAS pada Provinsi tersebut, jenis kegiatan pembinaan yang dilakukan, dan dokumentasi pembinaan yang dilakukan. Data dukung form keaktifan sebagaimana terlampir.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV 2020		Triwulan IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	90	100	91	100	90
%Capaian	111,11%		109,89		

Target IKU “Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas” tahun 2021 sebesar **91%** dari target tersebut, dalam hal capaian, Direktorat POA berhasil melampaui target yaitu dengan capaian sebesar **100%**. Dengan demikian capaian untuk indikator ini dapat dikatakan maksimal.

Maksimalnya capaian tersebut, dipengaruhi oleh gencarnya supervisi, Bimbingan Teknis serta pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pusat Direktorat POA ke seluruh Provinsi dalam rangka memonitoring pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh DKP Provinsi kepada POKMASWAS.

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp.552.910.000.- dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 552,473,167,-. atau 99,92% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama. yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas, (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli, (3) Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP, (4) Indeks kinerja operasional kapal pengawas dan (5) Indeks kinerja operasional speedoat pengawas.

2

PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS

Untuk memastikan WPPNRI terawasi dan terpantau dari aktifitas pengelolaan SDKP, Direktorat POA mengoperasikan sebanyak 8 unit kapal pengawas perikanan berukuran besar yang tersebar di beberapa wilayah perairan Indonesia. Kapal pengawas perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat POA sebagian besar ditempatkan di wilayah rawan IUU *fishing* dan perbatasan. Dasar penempatan tersebut, karena kapal-kapal yang dioperasikan Direktorat POA memiliki kelebihan berupa kapasitas BBM serta daya jelajah yang memadai, sehingga dapat diandalkan dalam menjalankan misi operasi perbatasan dan ZEEI. Adapun kedelapan kapal pengawas tersebut sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Armada Kapal Pengawas Dioperasikan Direktorat POA

No	Nama Kapal Pengawas	Kelas	Panjang
1	KP. Orca 01	I	60,00 meter
2	KP. Orca 01	I	60,00 meter
3	KP. Orca 01	I	60,00 meter
4	KP. Orca 01	I	60,00 meter
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II	42,50 meter
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II	42,50 meter
7	KP. Paus 01	III	39,50 meter
8	KP. Akar Bahar	V	15,54 meter

Untuk mengukur kinerja berupa luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat POA menggunakan armada kapal pengawas, telah disusun Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau kapal pengawas”. Tahun 2021 ditargetkan sebesar 23.86% cakupan WPPNRI yang dipantau oleh 8 unit kapal pengawas. Target tersebut hanya untuk kapal-kapal pengawas di bawah kendali Direktorat POA.

Rincian target dan capaian cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas periode triwulan IV 2021 lingkup Direktorat POA ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Target dan realisasi IKU-2 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	51	59,72	23,86	24,12	70,6
%Capaian	117,10 %		101,09%		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target cakupan kapal pengawas untuk triwulan IV 2021 sebesar 23,86% telah berhasil dicapai lebih dari 100% yaitu dengan capaian sebesar 24,12% dengan luasan WPPNRI yang berhasil diawasi sebesar 1.928.506NM². Capaian ini menggambarkan bahwa Direktorat POA mampu mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 dengan baik dan maksimal.

Maksimalnya pencapaian Direktorat POA terhadap IKU ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling berkaitan antara lain:

- 1) Berjalannya rencana operasi;
- 2) Berjalannya rencana perawatan armada kapal pengawas;
- 3) Penyiapan mitigasi risiko;
- 4) Koordinasi penyiapan logistik kapal dan logistik personil yang baik.

Selain kesiapan armada kapal pengawas, ketersediaan anggaran hari operasi yang cukup merupakan hal yang penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya IKU ini. Semakin besar hari operasi yang tersedia, maka semakin sering pula kegiatan operasi kapal pengawas dapat dilakukan.

Hari operasi kapal pengawas perikanan Direktorat POA tahun 2021 sebesar 100 hari, target tersebut bersifat rata-rata untuk 8 unit kapal pengawas. Hari operasi tersebut masih cukup untuk merealisasikan target awal operasi 2021. Namun demikian menjadi kurang ketika ada kegiatan operasi tambahan di akhir tahun yang tidak masuk dalam dokumen rencana operasi sebelumnya karena bersifat *urgent*, seperti operasi Natal dan Tahun Baru (NATARU) 2021.

Kekurangan hari operasi tersebut sejumlah 39 hari belum dilaporkan menjadi capaian kinerja 2021, dikarenakan kekurangan anggaran akan dipenuhi dalam revisi *carry over* pada DIPA 2022. Hari operasi tersebut bila dikonversi menjadi “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” menyumbang 1,92% coverage area / cakupan.

Berikut disampaikan data series target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

Tabel 8. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2017-2021

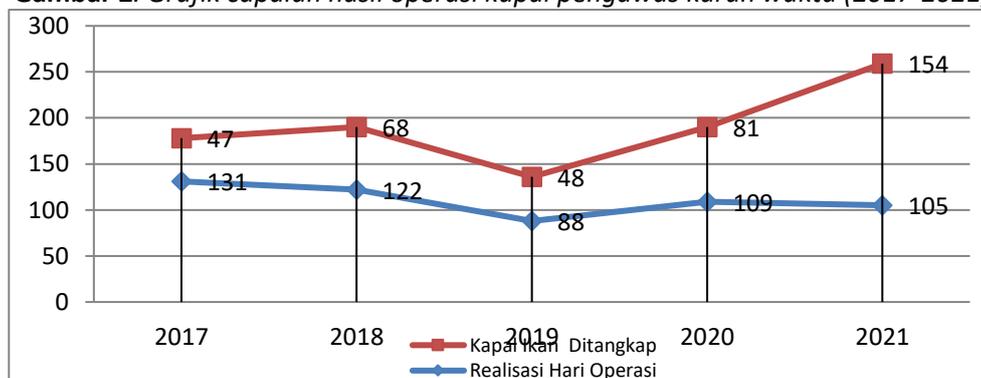
TAHUN	TARGET HARI OPERASI	CAPAIAN HARI OPERASI	%
2017	136	131	96.32
2018	145	122	84.14
2019	84	88	103.53
2020	105	109	103,81
2021	103	105	101,94

Target dan capaian hari operasi di atas, merupakan rata-rata untuk seluruh armada kapal pengawas. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target hari operasi tertinggi pada tahun 2018, dengan persentase capaian tertinggi pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi armada kapal pengawas perikanan yang siap operasi cukup banyak. Dari target dan capaian hari operasi kapal pengawas perikanan tersebut, berikut disampaikan capaian hasil operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu (2017-2021) sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan

Tahun	Realisasi Hari Operasi	Kapal Ikan Diperiksa	Kapal Ikan Ditangkap	Kapal Ikan Patuh	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	131	3.882	47	3835	98.79
2018	122	3.651	68	3583	98.14
2019	88	2.585	48	2537	98.4
2020	109	2969	81	2888	97.27
2021	105	2825	154	2671	94.55
Jumlah	555	15.192	398	15.514	97.43

Gambar 2. Grafik capaian hasil operasi kapal pengawas kurun waktu (2017-2021)



Berdasarkan gambar 2 diatas, terlihat trend capaian hasil operasi kapal pengawas perikanan kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan secara eksponensial, utamanya sejak tahun 2019 dimana kapal ikan yang ditangkap sejumlah 48 unit, lalu pada tahun 2020 menjadi 81 unit dan pada tahun 2021 meningkat tajam yaitu 154 unit kapal ikan yang ditangkap. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia baik yang dilakukan Kapal Ikan Asing maupun Kapal Ikan Indonesia masih terus terjadi dan cenderung mengalami peningkatan.

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp.98.553.233.000.- dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 98.538.250.948.- atau 99,98% dari total pagu.

3

PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU PESAWAT PATROLI

Untuk mengukur kinerja berupa luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat POA melalui udara, telah disusun Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau pesawat patroli”. Operasi pengawasan SDKP akan lebih efektif ketika dilakukan secara terintegrasi antara matra laut maupun udara serta informasi pusat pengendalian (PUSDAL). Beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh pesawat patroli dalam mendukung operasi pengawasan SDKP antara lain:

- 1) Validasi kapal perikanan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan visual terhadap kapal-kapal perikanan yang melanggar berdasarkan data PUSDAL;
- 2) Pemantauan posisi kapal illegal, dengan pesawat patroli dapat diketahui posisi terakhir kapal, jenis kapal, bahkan nomor lambung kapal dapat diinformasikan kepada kapal pengawas untuk *intercept*;
- 3) Pemantauan wilayah konservasi, dilakukan guna memantau dan memastikan aktifitas di wilayah konservasi dilakukan sesuai dengan aturan;
- 4) Foto udara, foto udara dilakukan untuk memperoleh gambar terkini terkait objek pengawasan;
- 5) Pemantauan aktifitas lain, yang dianggap perlu dalam mendukung kesuksesan operasi pengawasan SDKP;

Tahun 2021 ditargetkan sebesar 60.3% cakupan WPPNRI yang dipantau oleh pesawat patroli. Armada pesawat patroli udara yang digunakan melalui mekanisme sewa.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli udara ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli	53	69,34	60,3	60,37	73,9
%Capaian	130,83%		100,12 %		

Ket: T=Target;R=Realisasi

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli udara” periode Triwulan IV 2021 adalah sebesar 60,37% dari target sebesar 60,3% dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar 100,12% dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar 1.928.506NM².

Maksimalnya capaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi beberapa antara lain:

- 1) Adanya jadwal operasi pengawasan SDKP melalui udara;
- 2) Senantiasa melakukan evaluasi bulanan terkait kinerja operasi pengawasan melalui udara;
- 3) Melakukan revisi usul penambahan anggaran pada bulan Juli 2021.

Terdapat capaian sejumlah 39 hari operasi pesawat patroli yang belum dilaporkan menjadi capaian kinerja 2021 dikarenakan kekurangan anggaran operasi pesawat patroli tahun 2021. Kekurangan anggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam capaian kinerja operasi pesawat patroli tahun 2022 (Carry Over). Hari operasi tersebut bila dikonversi menjadi “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli” menyumbang 1,92% coverage area / cakupan.

Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli

Periode	Periode Pesawat Udara	Wilayah Operasi	Hari Ops	Jarak Tempuh Pesawat (NM)	Jangkauan Pemantauan (NM)	Cakupan Wilayah (NM ²)	Luas WPP NRI (NM ²)	Cakupan Wilayah (%)
				s	d	X = s*d	A	X/A
I	11 - 21 Januari 2021	711 dan 571	9	6683,6	16	106.937,6	1.928.506	5,55%
IA	19 - 21 Januari 2021	712	2	184,0	16	2.944,0	1.928.506	0,15%
II	31 Januari - 2 Februari 2021 11 - 23 Februari 2021	712, 572, 711, dan 716	13	6748,9	16	107.982,4	1.928.506	5,60%
III	1 - 13 Maret 2021	711 dan 573	10	3278,7	16	52.459,2	1.928.506	2,72%

Periode	Periode Pesawat Udara	Wilayah Operasi	Hari Ops	Jarak Tempuh Pesawat (NM)	Jangkauan Pemantauan (NM)	Cakupan Wilayah (NM ²)	Luas WPP NRI (NM ²)	Cakupan Wilayah (%)
				s	d	X = s*d	A	X/A
IIIA	9 dan 16 Maret 2021	711 dan 712	2	801,5	16	12.824,0	1.928.506	0,66%
IIIB	22 - 24 Maret 2021 dan 30 - 31 Maret 2021	711, 712, 713	4	3263,1	16	52.209,6	1.928.506	2,71%
IIIC	24 - 25 Maret 2021	711	1	744,0	16	11.904,0	1.928.506	0,62%
IV	11 - 12 April 2021 22 - 23 April 2021 25 April - 1 Mei 2021	711, 712, 573	10	3556,5	16	56.904,0	1.928.506	2,95%
IV-A	17 - 20 April dan 26 April - 1 Mei 2021	712, 713, 714, 573, 718	10	7263,7	16	116.219,2	1.928.506	6,03%
V	29 April - 6 Mei 2021 18 - 20 Mei 2021 27 - 29 Mei 2021	711, 712, 716	9	3068,0	16	49.088,0	1.928.506	2,55%
V-A	9 - 25 Mei 2021	711, 573, 715, 716	12	8468,4	16	135.494,4	1.928.506	7,03%
V-B	26 - 29 Mei 2021	718	4	4262,4	16	68.198,4	1.928.506	3,54%
VI	1 - 5 Juni 2021 2 - 11 Juni 2021 14 - 15 Juni 2021 13 - 21 Juni 2021	711, 571, 572	14	5589,4	16	89.430,4	1.928.506	4,64%
VI-A	9 - 15 Juni 2021 dan 21 - 26 Juni 2021	711, 572, 716, 717	11	6074,5	16	97.192,0	1.928.506	5,04%
VII	21 - 27 Juli 2021 dan 2 - 10 Agustus 2021	711, 716, 715	12	7096,6	16	113.545,6	1.928.506	5,89%
VIII	12 - 13 Agustus, 19 - 25 Agustus, dan 7 September 2021	713, 712, 572, dan 711	8	3365,7	16	53.851,2	1.928.506	2,79%
VIIIA	29 - 30 Juli 2021 2 & 5 Agustus 2021 6 - 7 Agustus 2021	712, 713, 714	4	1526,8	16	24.428,8	1.928.506	1,27%
VIIIB	13 - 16 Agustus 2021 19 & 21 Agustus 2021 31 Agustus - 2 September 2021 8 - 10 September 2021	711 dan 712	8	791,6	16	12.665,6	1.928.506	0,66%
TOTAL			143			1.164.278,4		60,37%

Selama periode operasi Triwulan IV 2021 telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) periode operasi dengan lokasi pangkalan operasi antara lain: Batam, Jakarta, NTT, Padang, Medan, Natuna, Manado, Tarakan, Ambon, Pontianak, Kupang, Banjarmasin dan Kendari. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 143 hari operasi. Pesawat yang digunakan

antara lain : "Beechcraft King Air B200GT Beechcraft Hawker 900XP", Beechcraft King Air B200GT, Seneca IV PA-34-220T dan Beechcraft King Air B200GT.

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut. antara lain :

1. Periode I : KP. Hiu Macan Tutul 02. KP. Paus 01. KP. Hiu 01. KP. Hiu 08. dan KP. Hiu 12
 2. Periode IB : KP. Orca 04
 3. Periode II : KP. Orca 04. KP. Hiu 05. KP. Orca 03. dan KP. Hiu Macan Tutul 02
 4. Periode III : KP. Paus 01 dan KP. Hiu Macan Tutul 02
 5. Periode IIIA : Operasi Mandiri
 6. Periode IIIB : KP. Paus 01 dan KP. Hiu Macan Tutul 02
 7. Periode IIIC : Operasi Mandiri
 8. Periode IV : KP. Hiu 17, KP. Orca 03
 9. Periode IVA : Pangkalan PSDKP Tual
 10. Periode V : Operasi Mandiri
 11. Periode VA : KP. Hiu Macan 01, KP. Orca 04, KP. Hiu Macan 06
 12. Periode VB : KP. Orca 04, KP. Hiu Macan 06
 13. Periode VI : Operasi Mandiri
 14. Periode VIA : KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Orca 03
 15. Periode VII : KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Hiu 11, KP. Orca 03
 16. Periode VIII : Operasi Mandiri
 17. Periode VIIIA : Operasi Mandiri
- Periode VIIIB : Operasi Mandiri

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 12. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode VIIIB 2021

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	11 - 21 Januari 2021	9	711. 571	106.937.6	KP. Hiu Macan Tutul 02. KP. Paus 01. KP. Hiu 01. KP. Hiu 08. dan KP. Hiu 12	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan 1 (satu) Kapal Bouke Ami >30 GT dengan nama KM. Sinar Rejeki dengan status Aktif pada tanggal 13 Januari 2021; • Pemantauan Kapal Ikan Asing (KIA) sebanyak 16 KIA Trawl terindikasi asal Vietnam.
IB	19 - 21 Januari 2021	3	712	2.944	KP ORCA 04	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi aktivitas Kapal Ikan Indonesia dengan Alat Tangkap Cantrang sebanyak 15 unit di Utara Pulau Jawa kepada Kapal Pengawas

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
II	31 Januari - 2 Februari 2021 dan 11-23 Februari 2021	13	712. 572. 711. 716	135.748.8	KP ORCA 04. KP HIU 05. KP ORCA 03. KP HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan 1 (satu) Kapal Handline dengan nama KM. Sinar Bintang-5 dan 1 (satu) Kapal Penampung dengan nama KM. Malindo Sukses dengan status Aktif pada tanggal 2 Februari 2021.
III	1 - 13 Maret 2021	10	711 dan 573	71.233.6	KP. PAUS 01. KP HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 3 unit Kapal Purse Seine >30GT dengan nama lambung KM. Mas Putri I. KM. Pulau Sambu III dan KM. Efany II. 3 unit Kapal Gill Net >30GT dengan nama lambung KM. Kartika 07. KM. Rejeki Puji Sentosa. dan KM. Rosmalia Jaya. dan 2 unit Kapal Pancing Cumi >30GT dengan nama lambung KM. Sumber Laut III dan KM. Indo dengan status transmitter aktif; Penerusan informasi keberadaan 20 (dua puluh) Kapal Ikan Asing asal Vietnam yang terdiri dari 17 Kapal Trawl Vietnam. 2 Kapal Light Boat Vietnam. dan 1 Purse Seine Vietnam serta 1 Kapal Patroli Perikanan Vietnam kepada Kapal Pengawas terintegrasi KP. Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Paus 01;
III-A	9 dan 16 Maret 2021	2	711 dan 712	17.097.6	-	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 1 unit Kapal Pancing Cumi >30GT dengan nama lambung KM. ADI DAYA-V dan 1 unit Kapal Gill Net >30GT dengan nama lambung KM. STAR

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						VIRGO dengan status transmitter aktif;
III-B	22 - 24 Maret 2021 dan 30 - 31 Maret 2021	4	711, 712, 713	52.209.6	KP. PAUS 01. KP HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 3 unit Kapal Purse Seine >30GT dengan nama lambung KM. Harmoni 2, KM. New Bintang Asia dan KM. Ketapang Jaya 1 dan 2 unit Kapal Gill Net >30GT dengan nama lambung KM. Tri Mina Santoso dan KM. Citra Bahari dengan status transmitter aktif; Validasi laporan masyarakat nelayan Natuna terhadap keberadaan KIA Vietnam di Laut Natuna Utara pada tanggal 30 Maret 2021 dengan menyusun Rencana Operasi ke titik dimaksud pada tanggal 31 Maret 2021 dan menemukan sejumlah 45 KIA Vietnam beroperasi di dalam Garis Landas Kontinen RI; Penerusan informasi keberadaan 45 KIA Vietnam dengan alat tangkap Pair Trawl di dalam Garis Landas Kontinen RI kepada KP. Hiu Macan Tutul 02 dan KP. Paus 01;
III-C	24 - 25 Maret 2021	2	711	11.904	-	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap SPKP 2 unit Kapal Purse Seine
IV	11 - 12 April 2021 22 - 23 April 2021 25 April - 1 Mei 2021	10	711, 712, 713	56.904	KP. HIU 17, KP. ORCA 03	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerusan data dan informasi kepada Kapal Pengawas ; 2. Henrikhan 1 (satu) unit KIA Vietnam dengan nama/nomor lambung KG 5090 TS tanggal 27 April 2020 oleh KP HIU 17

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<ul style="list-style-type: none"> 3. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.
IVA	17 - 20 April 2021 26 April - 1 Mei 2021	10	711, 712, 713, 714, 573, 718	116219.2	Pangkalan PSDKP Tual	<ul style="list-style-type: none"> 1. Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 6 unit Kapal Purse Seine >30GT, 3 unit Kapal Rawai >30GT 3 unit Kapal Gill Net >30GT dan 1 unit Kapal Squid Jigging >30GT 2. Penerusan informasi ke Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan 06, Hiu 14, dan Pangkalan PSDKP Tual; 3. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.
V	29 April - 6 Mei 2021 18 - 20 Mei 2021 27 - 29 Mei 2021	9	711, 712, 716	47.318,4	-	-
V-A	9 – 25 Mei 2021	12	711, 573, 715, 716	135.494,4	KP Hiu Macan 01 KP Orca 04 KP Hiu Macan 06	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 1 (satu) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Sumber Laut V, 1 (satu) unit Kapal Purse Seine KM. Bintang Surya III, dan 1 (satu) unit Kapal Cast Net KM. Citra Nusantara – 12; Penerusan informasi keberadaan KIA Vietnam kepada KP. Hiu Macan 01 dan dtindaklanjuti dengan menangkap 6 (enam) unit KIA Vietnam dengan nama lambung BD 30317 TS, BD 30535 TS, BD 30487 TS, BD 30990 TS, BD 31184 TS, dan BD 93742 TS. Namun

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						untuk Kapal China tidak berhasil ditangkap dikarenakan saat didatangi kapal pengawas terpantau sudah meninggalkan wilayah Indonesia;
V-B	26 – 29 Mei 2021	4	718	68.198,4	KP Orca 04 KP Hiu Macan 06	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 1 unit Kapal Purse Seine >30GT dengan nama lambung KM. Bintang Bahagia 38;
VI	1 - 5 Juni 2021 2 - 11 Juni 2021 14 - 15 Juni 2021 13 - 21 Juni 2021	14	711, 571, 572	89.430,4	-	-
VI-A	9 - 15 Juni 2021 dan 21 - 26 Juni 2021	11	711, 572, 716, 717	97.192	KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Orca 03, Satwas PSDKP Bungus	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 5 (lima) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Jawara Samudera 88, KM. Citra Baru, KM. Sun Jaya 88, KM. Bintang Wijaya, dan KM. Subur Setia dengan status transmitter aktif; Penerusan informasi keberadaan KIA Vietnam kepada KP. Hiu Macan 01 dan KP. Orca 03, KIA Filipina kepada KP. Paus 01 dan Stasiun PSDKP Biak, dan keberadaan Kapal Reefer Cargo asal Korea kepada Stasiun PSDKP Biak; Penerusan informasi hasil pemantauan Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa FAD Asing berbentuk rakit dan ponton di WPPNRI 717 Samudera Pasifik kepada Stasiun PSDKP Biak
VII	21 – 27 Juli 2021 2 – 10 Agustus 2021	12	711, 716, 715	113.545,6	KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Hiu	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukannya Misi Search And Rescue terhadap 14 Kapal

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
					11, KP. Orca 03	<p>Tenggelam di Perairan Kalimantan Barat dengan titik lokasi yang diberikan oleh BASARNAS dengan hasil pemantauan nihil tidak ditemukannya korban atau kapal tenggelam;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi hasil pemantauan kepada Pangkalan PSDKP Bitung mengenai Kapal Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa FAD berbentuk rakit dan ponton di Wilayah Operasi Pemantauan; • Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 1 (satu) unit Kapal Rawai dengan nama lambung KM. Sido Mulyo Barokah - 2, 1 (satu) unit Kapal Handline dengan nama lambung KM. Nutrindo PM-9, dan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Mina Haslindo dengan status transmitter aktif;
VIII	12 – 13 Agustus, 19 – 25 Agustus, dan 7 September 2021	8	713, 712, 572, dan 711	53851.2	-	<p>Validasi kepatuhan terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); 6 (enam) unit Kapal Purse Seine dengan nama lambung KM. Sony Tambah Makmur 03, KM. Aneka Sejati, KM. Tirta Mina, KM. Akbar Mulya Putra, KM. Rukun Arta Sentosa 06 dan KM. Wijaya 5; 1 (satu) unit kapal Gill Net dengan nama lambung KM. Elbianva 1; 1 (satu) unit Kapal Pengangkut KM. Hasil Laut III; dan 2 (dua) unit Kapal Cast Net dengan nama lambung KM. Ariana dan KM. Bintang Sumber</p>

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						Jaya – 8 dengan status transmitter aktif;
VIII-A	29 - 30 Juli 2021 2 & 5 Agustus 2021 6 - 7 Agustus 2021	4	712, 713, 714	8283.2	-	-
VIII-B	13 - 16 Agustus 2021 19 & 21 Agustus 2021 31 Agustus - 2 September 2021 8 - 10 September 2021	8	711 dan 712	9568	-	-
Total Hari Operasi		143	Coverage Area (NM²)	1.145.035,2		

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp.37.911.387.000.- dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp. 37.896.972.961.- atau 99,96% dari total pagu.

4

INDEKS PEMENUHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN UNTUK OPERASI PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisi Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA periode Triwulan IV 2021 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T

Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	80	100	80	96,67	80
%Capaian	125%		120,84%		

Ket: T=Target;R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target untuk triwulan IV 2021 sebesar 80% telah tercapai dengan maksimal yaitu sebesar 96,67%. Indikator ini merupakan IKU baru yaitu diberlakukan pada tahun 2020. Bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 (Triwulan IV) terdapat sedikit namun tetap melampaui dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi juga telah melampaui target yang ditetapkan.

Maksimalnya pencapaian pada IKU ini dipengaruhi karena Direktorat POA berkomitmen melakukan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan baik diminta maupun tidak, sehingga data senantiasa tersedia.

Pemenuhan analisis data pada periode Triwulan IV 2021 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Kebutuhan Operasi Kapal Pengawas, Kebutuhan Operasi Pesawat Patroli, Analisis Pergerakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan Pemantauan Kapal Perikanan di 10 (sepuluh) Wilayah Konservasi Nasional.

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp. 4.509.186.000.- dan sampai dengan Triwulan IV 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 4.385.392.594.- atau 97,25% dari total pagu.

5

INDEKS KINERJA OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan. yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional. Regional. dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	QT	A	T
Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	86,72	88,24	86,75	90,68	89
%Capaian	101,75%		104,53%		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target triwulan IV 2021 sebesar 86,75% telah tercapai dengan maksimal bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 (Triwulan IV) realisasi meningkat cukup signifikan. Maksimalnya capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya persentase capaian hari operasi dari 9 komponen nilai indikator kinerja kapal pengawas dengan nilai tertinggi sebesar 97 dengan bobot 20% dengan nilai akhir 19,40. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 90,68% dengan realisasi 104,53%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa armada kapal pengawas perikanan Direktorat POA telah memenuhi Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas yang ditetapkan, itu artinya kinerja kapal pengawas Dit. POA dalam kategori baik sesuai dengan yang diharapkan.

6

INDEKS KINERJA OPERASIONAL SPEEDBOAT PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas terdiri dari 5 (lima) indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan. yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU *Fishing*;
5. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas	86,72	86,72	86,75	95,57	89
%Capaian	100%		110,17%		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru ada di tahun 2020. Capaian IKU “Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas” bila dibandingkan dengan target Triwulan IV 2020, realisasi capaian meningkat dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi persentase coverage area pengawasan dari 5 komponen nilai indikator kinerja speedboat pengawas dengan nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot 25% dengan nilai akhir 25, sehingga menjadi penyumbang nilai terbesar dari total komponen indikator speedboat. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 95,57% dengan realisasi 110,17%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi hasil Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Speedboat Pengawas dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan.

7

PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SPEEDBOAT PENGAWAS

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Pembangunan Speedboat Pengawas” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2021.

Hingga Triwulan IV 2021 terdapat rencana pembangunan sarana pengawasan SDKP Speedboat Pengawas sebanyak 2 unit, dimana pembangunannya dilaksanakan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan jenis kontrak *multi years*.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021	
	T	R
Persentase Penyelesaian Pembangunan Speedboat Pengawas	66,35	96,79
%Capaian	145,88%	

Berdasarkan tabel di atas, IKU “Persentase Penyelesaian Pembangunan *Speedboat* Pengawas” dengan target pada triwulan IV 2021 sebesar 66,35% telah tercapai sebesar 96,79% dengan persentase capaian sebesar 145,88% dengan kata lain telah melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi secara berkala kepada konsultan pengawas mengenai progres kegiatan setiap minggunya, disamping itu Tim pengendali dari kelompok Infrastruktur senantiasa melakukan supervisi dengan melibatkan APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp1,699,600,000.- dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp1,645,662,830 atau 96,83% dari total pagu.

8

PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

Keberhasilan operasi pengawasan SDKP dengan menggunakan armada kapal pengawas, sangat bergantung pada kesiapan armada kapal pengawas itu sendiri. Tanpa armada kapal pengawas yang sehat, maka operasi pengawasan SDKP tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk memastikan kondisi armada kapal pengawas selalu siap operasi, maka perlu dilakukan *maintenance repair dan overhaul* (MRO). MRO tersebut *breakdown* menjadi perawatan preventif, perawatan prediktif, perawatan darurat dan penyediaan suku cadang.

Untuk mengetahui kinerja dari MRO terhadap kapal pengawas, Direktorat POA telah Menyusun indikator kinerja utama berupa “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan”. IKU ini bertujuan untuk mengukur seluruh target MRO/perawatan armada kapal pengawas perikanan agar berjalan sesuai rencana seperti jadwal pelaksanaan, item pekerjaan, dan target output. Indikator ini relatif baru dan baru ditetapkan pada tahun 2021 sebagai upaya penyempurnaan dari indikator sebelumnya.

Tabel 17. Rincian perawatan armada kapal pengawas tahun 2021

NO	KP	Jenis Target Perawatan			Tanggal Pelaksanaan	Target	Realisasi	%	% Rata2
		Preventif	Prediktif	Darurat					
1	KP Orca 01	Penggantian terpal penutup atau pelindung			15 Februari 2021	1 set	1 set	100	100,00
		Penggantian terpal, penutup accu dan motor tempel	Perbaiki sofa upper dek		18 Februari 2021	1 set	1 set	100	
					22 Februari 2021	1 set	1 set	100	
					22 Februari 2021	1 set	1 set	100	
	Perbaiki sofa main								

NO	KP	Jenis Target Perawatan			Tanggal Pelaksanaan	Target	Realisasi	%	% Rata2
		Preventif	Prediktif	Darurat					
			dek						
			Perbaikan sofa sofa lower dek		22 Februari 2021	2 set	2 set	100	
			Docking		27 Oktober - 7 Desember 2021	1 paket	1 paket	100	
			General over haul main engine kiri		14 Juni - 10 November 2021	1 unit	1 unit	100	
2	KP Orca 02	Perbaikan AC			1 Maret 2021	1 unit	1 unit	100	
		Perbaikan Winch Davit Crane kanan			1 Desember 2021	1 unit	1 unit	100	
		Perbaikan lantai lorong lower deck			29 November 2021	1 set	1 set	100	
			General Overhaul		19 Maret - 14 Agustus 2021	1 unit	1 unit	100	
			Docking		26 September - 31 Desember 2021	1 paket	1 paket	100	
3	KP Orca 03		Docking		17 November - 31 Desember 2021	1 paket	1 paket	100	
4	KP Orca 04		Servis 5000 jam main engine		19 Maret - 27 Mei 2021	2 unit	2 unit	100	
			Servis elektro motor AHU AC		15 Desember 2021	1 set	1 set	100	
			Perbaikan elektromotor fan cold storage		15 Desember 2021	1 set	1 set	100	
			Perbaikan pompa ebara 225-2 (cold storage)		15 Desember 2021	1 set	1 set	100	
5	KP HMT 01		Docking		20 Oktober - 2 Desember 2021	1 paket	1 paket	100	
			Perbaikan kerusakan gearbox		8 Desember 2021	1 unit	1 unit	100	
			Penggantian pompa celup		6 Desember 2021	1 unit	1 unit	100	
6	KP HMT 02	Servis fuel injection	Docking Overhaul AE		22 Februari 2021	1 set	1 set	100	
					5 September - 11 November 2021	1 paket	1 paket	100	
					23 Juli - 19 November 2021	1 unit	1 unit	100	
			Perbaikan reverse osmosis		7 juni - 7 November 2021	1 unit	1 unit	100	
7	KP Paus 01		Docking		1 November - 20 Desember 2021	1 paket	1 paket	100	
8	KP Akar Bahar	Perbaikan Interior	Pemasangan main engine		29 Juli - 27 Agustus 2021	1 paket	1 paket	100	
					7 Juni - 7 Juli 2021	1 unit	1 unit	100	
PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN KAPAL PENGAWAS 2021									100,00

Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan, secara rinci ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021	
	T	R
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan	100	100
%Capaian	100%	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas, target IKU “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan” sebesar 100% mampu dicapai oleh Direktorat POA secara maksimal yaitu dengan capaian sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan kegiatan MRO yang dilakukan oleh Direktorat POA berjalan dengan baik sesuai dengan target.

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun repair list masing-masing kapal pengawas secara rinci;
- 2) Senantiasa melakukan rapat konsultasi dengan APIP terkait pekerjaan MRO;
- 3) Menyusun dokumen manajemen risiko kegiatan perawatan;
- 4) Senantiasa melakukan rapat evaluasi kepada pihak galangan atau pelaksana pekerjaan untuk mengetahui progress pekerjaan;
- 5) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala dan bergantian untuk mempermudah koordinasi dan memperoleh data faktual detil pekerjaan di lapangan.

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp 54,022,550,000 dan sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp53,829,645,492 atau 99.64% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA, (3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (4) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (6) Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Direktorat POA, (7) Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA, (8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (9) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA, (10) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA dan (11) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Registrasi dan Aktivasi Transmitter;
2. Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan;
3. Pemberian Akses Kapal Perikanan;

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Indikator 9 ini merupakan indikator baru pada tahun 2021, sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini disusun untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna layanan SPKP. Penilaian dilakukan dengan mekanisme survey. Dengan mekanisme survey ini diharapkan diperoleh gambaran objektif dari pengguna layanan seberapa puas atas layanan yang diberikan oleh Direktorat POA.

Ruang lingkup pengukuran dilakukan dengan menggunakan google form secara langsung dengan pembagian kuesioner sebagai berikut:

- 1) Pelayanan registrasi dan aktivasi transmitter sebanyak 50 responden;
- 2) Pelayanan pemantauan pergerakan kapal perikanan sebanyak 50 responden;
- 3) Pelayanan pemberian akses pemantauan kapal perikanan sebanyak 50 responden.

Adapun metode yang digunakan melalui pendekatan skala likert (angket). Terdapat 9 unsur yang dijadikan pengukuran antara lain:

- 1) Persyaratan pelayanan;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur;
- 3) Waktu pelayanan;
- 4) Biaya/tarif;
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) Kompetensi pelaksana;
- 7) Perilaku pelaksana;
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
- 9) Sarana dan prasarana.

Target dan realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SPKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021	
	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	80	89,96
%Capaian	112,45%	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas, indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP” dengan target 80% mampu dicapai dengan maksimal oleh Direktorat POA dengan capaian kinerja sebesar 89,96% atau dengan persentase capaian sebesar 112,45%.

Maksimalnya capaian kinerja tersebut, diakarenakan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat POA secara berkesinambungan seperti:

- 1) Persyaratan pelayanan yang tidak rumit;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur, yang jelas dan terstandar;
- 3) Waktu pelayanan yang singkat, apalagi dengan adanya inovasi berupa pengembangan aplikasi layanan seperti SALMON, sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengurus perizinan;
- 4) Biaya/tarif, tidak dipungut biaya;
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan jelas dan merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh pemilik kapal perikanan;
- 6) Kompetensi pelaksana senantiasa dilakukan peningkatan melalui pelatihan;
- 7) Perilaku pelaksana, dalam kegiatan pelatihan terhadap operator juga ditanamkan bagaimana attitude dan prinsip-prinsip pelayanan seharusnya, seperti senyum, salam dan sapa.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan juga senantiasa dibuka seluas-luasnya seperti menyediakan kotak pengaduan maupun nomor pengaduan dalam rangka perbaikan pelayanan.
- 9) Sarana dan prasarana juga senantiasa diperhatikan oleh Direktorat POA dalam rangka menjamin berjalannya aplikasi hasil inovasi.

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp1,646,740,000 dan telah terealisasi sebesar Rp1,624,972,669 atau 98,68%.

10

PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN NSPK BIDANG PENGAWASAN SDKP LINGKUP DIREKTORAT POA

Persentase penyelesaian rancangan NSPK difokuskan pada proses perencanaan kebijakan, yaitu pada tahap penyusunan agenda dan tahap formulasi kebijakan dengan output/keluaran berupa draft substansi NSPK yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting* dan pengesahan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021
-------------------	------------------

	T	R
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	100	100
%Capaian	100%	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel di atas, IKU “Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA” dengan target 100% telah berhasil dicapai dengan maksimal. Maksimalnya pencapaian atas target kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam penyelesaian NSPK di bidang pemantauan dan operasi armada;
- 2) Penetapan target NPSK yang prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan;

Adapun draft NSPK yang disusun oleh Direktorat POA sebagai berikut:

No	NSPK	Target	Realisasi	%
1	Rancangan perubahan Juknis Perdirjen No.04 Tahun 2020 tentang Juknis pelaksanaan operasi pengawasan SDKP melalui udara (air surveillance)	1 NSPK	1 NSPK	100
2	Rancangan Perdirjen PSDKP tentang Juknis Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	1 NSPK	1 NSPK	100
3	Rancangan Perdirjen PSDKP tentang Pedoman penggunaan, perawatan pemeliharaan, dan pemusnahan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP	1 NSPK	1 NSPK	100
Persentase penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA (Rata-rata)				100

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp638,000.- dengan realisasi sebesar Rp.638.000.- atau 100% dari total pagu.

11

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel. yaitu : ¹⁾ Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin. dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20 oj+Seminar)/3)
+ (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20 oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp)
+ (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20 oj+ Seminar)/3) + (NilaiSkp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	72	68,85	73	74,3	76
%Capaian	95,63%		101,78		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan target Triwulan IV 2019 dan 2020 realisasi capaian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 74,3 dengan realisasi 101,78%, hal ini dipengaruhi oleh faktor dari 4 variabel pengukuran dengan nilai tertinggi ada di variabel disiplin dengan bobot 5% dengan score 99% dan saling mengingatkan antar kelompok untuk menjaga kedisiplinan dilingkungan unit kerja. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi akan ditingkatkan dari sisi variabel yang lain seperti Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi hasil Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA untuk menjadikan ASN yang Profesional dan Disiplin serta bertanggung jawab.

12

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV 2021 telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP pada Bulan November 2021.

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	T
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	75	85	76	88	80
%Capaian	133,33%		115,79 %		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru ada di tahun 2020. Capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan target Triwulan IV 2020 realisasi capaian mengalami penginkatan dari target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 88 dengan realisasi 115,79%, hal ini dipengaruhi oleh hasil nilai post test dari bimtek dan sosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait aplikasi SPKP dan cara menggunakannya. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengoperasikan Aplikasi SPKP.

13

NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP DIREKTORAT POA

Nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi merupakan verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja.

Tabel 23. Rincian target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021	
	T	R	T	R
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	89,91	90	98,77
%Capaian	99,90%		109,74%	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2020. Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA” bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 capaian realisasi meningkat dengan target yang sama, hal ini dikarenakan terdapat beberapa dokumen pendukung yang kurang memadai. Namun demikian pada tahun 2021 capaian meningkat menjadi 98,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya upaya perbaikan yang dilakukan Direktorat POA dari aspek penilaian kesesuaian untuk mengecek kembali sesuai dengan kebutuhan rekon, sehingga capaian tahun 2021 melampaui target yang

ditetapkan. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 98,77% dengan realisasi 109,74% yang telah dilaksanakan di Raiser, Cibinong pada tanggal 18-20 November 2021.

14

UNIT YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT POA

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada terselenggara pada periode Triwulan IV Tahun 2021 dengan penerapan Aplikasi Dashboard ORCA (Otomatis, Real-Time, Cepat dan Akurat) yang dilanjutkan penerapannya hingga saat ini.

Tabel 24. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021	
	T	R	T	R
Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Direktorat POA	1	1	1	1
%Capaian	100%		100%	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru ada di tahun 2020. Capaian IKU “Unit Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Dikretorat POA” ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Bila dibandingkan dengan tahun yang sama tahun 2020 (Triwulan IV) realisasi relatif sama dengan capaian melampaui target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 1 dengan peresentase realisasi 100%, hal ini dipengaruhi agar Direktorat POA selalu membuat inovasi tahunan untuk membuat kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Dikretorat POA untuk meningkatkan kualitas secara transparansi dalam pelayanan publik.

15

INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi unit kerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang bermanfaat bagi masyarakat, baik unit kerja maupun pegawainya dalam lingkup program budaya kerja. Penerapan program budaya kerja terdiri dari 5 (lima) komponen yakni Profesional, Integritas, Loyalitas, inovAtif dan sineRgi atau PILAR PSDKP.

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menghasilkan inovasi pelayanan publik dengan inovasi Aplikasi Dashboard ORCA (Otomatis, Real-Time, Cepat dan Akurat) secara online yang

dibutuhkan untuk Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan secara Otomatis, Real-Time, Cepat dan Akurat.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	
Inovasi Gugus Kerja Transformasi Yang Dihasilkan Lingkup Direktorat POA	1	1	1	1	1
%Capaian	100%		100%		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru ada di tahun 2020. Capaian IKU “Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang Dihasilkan Lingkup Dikretorat POA” ditargetkan sebesar 1 Inovasi. Bila dibandingkan dengan tahun yang sama tahun 2020 (Triwulan IV) realisasi relatif sama dengan capaian melampaui target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 1 dengan realisasi 100%, hal ini dipengaruhi agar Direktorat POA selalu membuat inovasi tahunan untuk membuat kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang Dihasilkan Lingkup Dikretorat POA untuk meningkatkan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

16

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV 2021

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 26. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021	
	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	72,5	100
%Capaian	137,93	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2021. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 72,5%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 100 dengan realisasi 137,93%, hal ini dipengaruhi oleh siapnya data dukung dan juga pencatatan BAST pemeliharaan BMN yang ada dan kesesuaian antara RKBMN dengan RKAKL. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA.

17**TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DIREKTORAT POA**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV 2021.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 27. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2021	
	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	72,5	93,39
%Capaian	128,81	

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2021. Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 72,5%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 93,39 dengan realisasi 128,81%, hal ini dikarenakan dari 4 indikator penilaian ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang /jasa tercatat dengan jelas dan lengkap sesuai dengan kegiatan yang ada. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA

senantiasa memenuhi target dari Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA.

18

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

a. Keikutsertaan

Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV

b. Dokumen

Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain :

Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim,

Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja

c. Keaktifan

Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa), What (Apa yang terjadi), Where (dimana peristiwa terjadi), When (kapan peristiwa terjadi), Why (mengapa hal itu terjadi) dan How (bagaimana hal itu terjadi).*

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA	82	90,37	84	98,79	90
%Capaian	110,21%		117,61		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA” selalu meningkat, dikarenakan keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan setiap waktu. Bila dibandingkan dengan

Triwulan IV Tahun 2020 realisasi capaian meningkat dan melampaui dari target yang ditetapkan, dengan target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 98,79 dengan realisasi 117,61%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA untuk meningkatkan Penilaian Pengukuran Manajemen Pengetahuan untuk digunakan kembali.

19

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 29. Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan IV 2021

INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV 2020		TRIWULAN IV 2021		Target 2024
	T	R	T	R	
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	60	75,92	65	80	80
%Capaian	126,53%		123,08		

Ket: T=Target; R=Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan 5 tahun terakhir karena IKU baru di tahun 2019. Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020 realisasi capaian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja untuk periode Triwulan IV 2021 sebesar 80 dengan realisasi 123,08%, hal ini dipengaruhi oleh jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja kedepannya dan arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi relatif sama dengan target yang ditetapkan.

Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses tindak lanjut berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan IV 2021 adalah sebesar **Rp 200.660.185.239,-** atau **99,77%** dari pagu **Rp 201.122.826.000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lebih besar dengan jumlah pagu yakni sebesar **Rp188.974.856.860** atau **97.78%** dari pagu **Rp193,273,811,000**. Hal ini dipengaruhi pada kondisi dilapangan mengingat terjadi pandemi covid-19 dan terdapat kebijakan pemerintah secara Nasional untuk penghematan untuk penanggulangan pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Tabel 30. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Desember 2021

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	638.000	638.000	100	0	0
Layanan Penerbitan Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT)	1.646.740.000	1.624.972.669	98,68	21.767.331	1,32
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	552.910.000	552.473.167	99,92	436.833	0,08
Operasi Armada Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya	108.920.000	80.578.987	73,98	28.341.013	26,02
Prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya	412.000.000	410.565.850	99,65	1.434.150	0,35
Sarana Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya	892.200.000	889.734.141	99,72	2.465.859	0,28
Sarana Pengawasan SDKP Lainnya	371.322.000	318.775.950	85,85	52.546.050	14,15
Operasi Kapal Pengawas	98.553.233.000	98.538.250.948	99,98	14.982.052	0,02
Operasi Pesawat Patroli	37.911.387.000	37.896.972.961	99,96	14.414.039	0,04

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Kapal Pengawas	442.140.000	433.976.100	98,15	8.163.900	1,85
Speedboat Pengawas	1.699.600.000	1.698.208.380	99,92	1.391.620	0,08
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	54.022.550.000	53.829.645.492	99,64	192.904.508	0,36
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	4.509.186.000	4.385.392.594	97,25	123.793.406	2,75
TOTAL	201.122.826.000	200.660.185.239	99,77	462.640.761	0,23

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a. Data capaian kinerja Sasaran Kegiatan POA
- b. Data capaian atas pelaksanaan Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- c. Data alokasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO)
- d. Data realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kinerja 4 Sasaran Kegiatan dibandingkan dengan realisasi anggaran KRO yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan:

Tabel 31. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Direktorat POA

Sasaran Kegiatan		Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)**	Realisasi (Rp)***	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
SK 01	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	109.89	552,910,000	552,473,167	99.92	0.1
SK 02	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	107.18	141,082,726,000	140,901,195,490	99.87	2.1
SK 03	Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	110.00	57,839,812,000	57,580,905,913	99.55	-0.2
SK 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	109.85	1,647,378,000	1,625,610,669	98.68	1.3
Jumlah		109.23	201,122,826,000	200,660,185,239	99.77	3.27

Sumber:

*Aplikasi Kinerjaaku

**Aplikasi Kinerja Bappenas

***Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja Direktorat POA tahun 2021 adalah sebesar 109,23 persen, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 99,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 3,27 persen yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Selain itu sepanjang tahun 2021, dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas anggaran melalui *refocusing* anggaran

Direktorat POA telah melakukan *refocusing*/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya. Di tahun 2020 Direktorat POA telah melakukan *refocusing* anggaran sebanyak empat kali dalam rangka memenuhi dampak penanggulangan covid nasional. Direktorat POA terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin

memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

2. Optimalisasi Kinerja Operasi Pesawat Patroli Udara/Airborne Surveillance Untuk Menghemat Pemakaian BBM Kapal Pengawas

Dalam rangka optimalisasi kinerja operasi armada kapal pengawas, Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data hasil validasi yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena operasi dilakukan berdasarkan target operasi yang jelas.

3. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Zoom Meeting

Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Lingkup Direktorat POA mencakup satker pusat dan UPT, pertemuan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala melalui zoom meeting. Selanjutnya, pemantauan perkembangan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh dilakukan melalui supervisi/pendampingan/pembinaan secara daring, termasuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan IV 2021

A. Kesimpulan

- 1) Terdapat penyesuaian target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja Direktorat POA karena refocusing yaitu IKU 3 dan IKU 7.
- 2) Terdapat pengurangan pagu anggaran karena *refocusing* sebesar Rp219,694,036,000 yang semula Rp420,816,862,000 menjadi Rp201,122,826,000.
- 3) Realisasi anggaran Direktorat POA tahun 2021 sebesar 99.77% atau sebesar Rp200,668,205,239 dari pagu Rp201,122,826,000.
- 4) Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja organisasi lingkup Direktorat POA dari total 19 indikator kinerja, telah tercapai seluruhnya dengan capaian kinerja NPSS sebesar 109,23% dengan indikator berwarna **HIJAU**.
- 5) Terdapat capaian hari operasi kapal pengawas tahun 2021 sejumlah 39 hari tidak dilaporkan menjadi capaian kinerja Direktorat POA periode tahun 2021, karena anggaran bersifat *carry over* di tahun 2022.
- 6) Efisiensi operasi telah dilakukan dengan memaksimalkan operasi pemantauan melalui udara, sehingga operasi kapal pengawas menjadi lebih terarah dengan penerapan pola *intercept*.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
a) Memastikan pelaksanaan anggaran periode 2022 berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana aksi pencapaian kinerja.	a) Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sesuai dengan revisi anggaran.
b) Untuk menjamin ketersediaan anggaran operasi pengawasan, dalam merencanakan operasi kapal pengawas maupun pesawat patroli, perlu diperhatikan alokasi anggaran untuk operasi akhir tahun, seperti operasi NATARU serta selisih harga sewa pesawat.	b) Menyusun rencana operasi beserta alokasi biaya sesuai kebutuhan operasi, termasuk estimasi eskalasi harga BBM maupun harga sewa.
c) Memastikan kegiatan dan anggaran pesawat patroli tahun 2021 untuk ditambahkan pada tahun 2022 (<i>carry over</i>).	c) Membuat usulan tambahan anggaran untuk biaya <i>carry over</i> Operasi Pesawat Patroli tertunggak (2021) pada DIPA Direktorat POA 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN